

**ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA POHUWATO TIMUR
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**FITRIYANTI B IKI
E1119152**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA POHUWATO TIMUR
KABUPATEN POHUWATO**

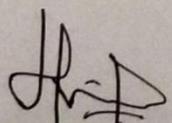
Oleh

**FITRIYANTI B IKI
E1119152**

SKRIPSI

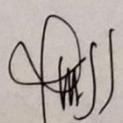
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Gorontalo, 11 Februari 2021

PEMBIMBING I



Syamsuddin, SE.,Ak.,MM
NIDN : 09 130374 02

PEMBIMBING II



Purnama Sari, SE.,M.Si
NIDN : 09 120788 02

HALAMAN PERSETUJUAN

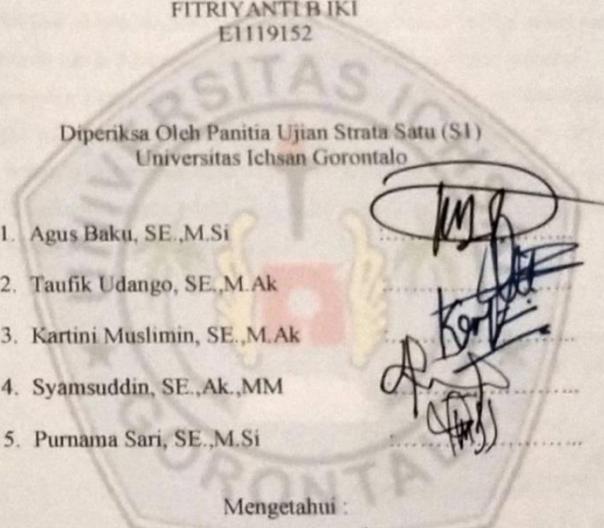
**ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA POHWATO TIMUR
KABUPATEN POHWATO**

Oleh

FITRIYANTI BJKI
E1119152

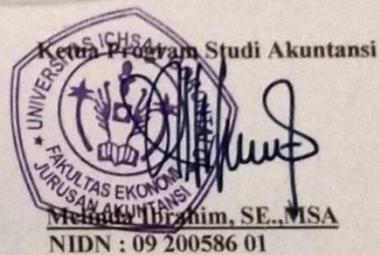
Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Agus Baku, SE.,M.Si
2. Taufik Udango, SE.,M.Ak
3. Kartini Muslimin, SE.,M.Ak
4. Syamsuddin, SE.,Ak.,MM
5. Purnama Sari, SE.,M.Si



TMF
Kor
D
Hans

Mengetahui :



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 23 November 2021
Yang Membuat Pernyataan

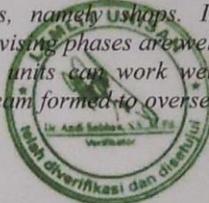


ABSTRACT

FITRIYANTI B IKI. E1119152. ANALYSIS OF REVENUES AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTERPRISES (BUMDES) AT POHuwATO TIMUR VILLAGE, POHuwATO DISTRICT

This study aims to know the revenues of Village-Owned Business Enterprises (BUMDes) in terms of revenue recognition and management of BUMDes in terms of planning and supervision at Pohuwato Village, Pohuwato District. The research method used in this study is qualitative. The result of the study indicates that in the case of revenues, the revenue managed by the head of the business unit at BUMDes Panua Mandiri is categorized as very good because both revenues and expenses are properly recorded and reported to the BUMDes management. Apart from that, the revenues generated can add one type of business, namely ushops. In management, the planning, organizing, directing, and supervising phases are well run because the management and managers of business units can work well together. The BUMDes Panua Mandiri has a supervisory team formed to oversee the performance of the head of the business unit.

Keywords: revenues, management, BUMDes



ABSTRAK

FITRIYANTI B IKI. E1119152. ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA POHuwATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan BUMDes ditinjau dari segi pengakuan pendapatan dan pengelolaan BUMDes ditinjau dari segi perencanaan dan pengawasan pada Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dari sisi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan yang dikelola oleh kepala unit usaha di BUMDes Panua Mandiri sudah sangat baik, karena penerimaan maupun pengeluaran dicatat dan dilaporkan dengan baik kepada para pengurus BUMDes. Selain dari itu dari pendapatan yang dihasilkan mampu menambah satu jenis usaha yaitu kedai. Sisi pengelolaan, menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengawasan sudah baik, karena pengurus dan pengelola unit usaha mampu melakukan kerja sama dengan baik, serta di BUMDes Panua Mandiri juga telah dibentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi kinerja kepala unit usaha.

Kata kunci: pendapatan, pengelolaan, BUMDes



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “analisis pendapatan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa pohuwato timur kabupaten pohuwato”. Sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat selesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Oleh karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE,, M.Ak.,CSRS, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengatahanan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M,Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Agus Baku, SE, M.Si Selaku Pembimbing I, dan Ibu Nurhidayah, SE., MM, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada orang tua, suami serta keluarga yang telah membantu/mendukung saya, serta Bapak Ibu dosen, staf administrasi Universitas Ichsan Gorontalo dan rekan – rekan seperjuangan terutama mahasiswa akuntansi yang telah membantu dalam proses perkuliahan sampai dengan ujian skripsi,

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bekepentingan.

Gorontalo,2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.3.1 Maksud Penelitian | 7 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 9 |
| 2.1. Kajian Pustaka | 9 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 28 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1. Objek penelitian | 32 |
| 3.2 .Metode penelitian..... | 32 |
| 3.2.1. Desain Penelitian | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.2. Definisi dan Operasionalisasi Veriabel | 32 |
| 3.2.3 Teknik pengumpulan data | 36 |
| 3.2.4 Jenis dan Sumber Data..... | 36 |
| 3.3. Informan | 37 |
| 3.4. Metode Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 4.1. Gambaran Umum BUMDes Pohuwato | 39 |
| 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 40 |
| 4.2.1. Analisis pendapatan | 40 |
| 4.2.3. Analisis Pengelolaan | 41 |
| BAB V PENUTUP..... | 46 |
| 5.1. Kesimpulan | 46 |
| 5.2. Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| JADWAL PENELITIAN | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 31 |
|------------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Jadwal Penelitian..... | 41 |
| Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian..... | 43 |
| Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian | 44 |
| Lampiran 4 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi | 45 |
| Lampiran 5 Hasil Turnitin | 46 |
| Lampiran 6 Curriculum Vitae..... | 48 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut, (UU No 6 Tahun 2014).

Desa juga berperan sebagai aktor peningkatan perekonomian masyarakat, maka dari itu pemerintah pusat telah mengangkarkan anggaran melalui dana desa. Setiap desa berhak mendapatkan anggaran 1 miliar dari pemerintah pusat.dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah pusat telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2014 sebagai landasan dalam sistem pengelolaannya. Melalui peraturan mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah demi mewujudkan peningkatan masyarakat maka dengan ini di setiap desa harus mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes).

Berbicara tentang badan us ¹ desa (atau disingkat menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.Pemerintah Desa bisa

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Adapun Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Mengacu pada salah satu tujuan bumdes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat di definisikan salah satu fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, dan masyarakat, dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa – desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan bumdes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan desa setempat, dan diharapkan bumdes tersebut memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa.

Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi pada umumnya tujuan suatu bumdes adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*), sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup demi kesinambungan bumdes dan hingga pada akhirnya bumdes mampu berkembang menjadi bumdes yang lebih besar dan tangguh. Kesuksesan bumdes dalam mengembangkan bisnisnya hanya dapat dicapai melalui pengelolaan yang baik, antara lain dalam pengelolaan manajemen keuangan sehingga diharapkan modal yang dimiliki bisa berfungsi semaksimal mungkin.

Dalam mengelola manajemen keuangan, khususnya mengenai pendapatan usaha sangat perlu direncanakan faktor-faktor penunjang peningkatan pendapatan dan dianalisa sedetil mungkin, sehingga kebijakan yang diambil tidak keliru dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendirian suatu perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dari berbagai macam tujuan perusahaan tersebut, maka laba merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan. Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan bentuk badan usaha yang dikelola oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dengan memberikan program-program kegiatan yang berpotensi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih banyak konsistensi. Maka dari itu, penelitian mengenai pengelolalan bumdes masih terus dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya :

Mahendra Adi Nugraha (2015), dengan judul penelitian Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi di Kabupaten Tulungagung) dimana hasil penelitian tersebut bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan.

Made Ayu Windasari dkk (2019), Dengan judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kerta Sari Utama Di Desa Kesiman Kertalangu Dan Bumdes Sima

Sari Dana Di Desa Kesiman Petilan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif Manajemen Perusahaan Milik Desa (BUMDes) di Kerta Sari Utama di Desa Kesiman Kertalangu dan BUMDes Sima Sari Dana di Jakarta Desa Kesiman Petilan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) menggunakan efektivitas langkah-langkah dilakukan melalui pendekatan sumber daya, pendekatan proses, pendekatan tujuan. Pelajaran ini membuktikan bahwa manajemen BUMDes Kerta Sari Utama dan BUMDes Sima Sari Dana di Jakarta meningkatkan PAD sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif karena masih ada kendala untuk indikator pengukuran.

Purnama Sari. 2019 dengan judul penelitian Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Didesa Pohuwato Kabupaten Pohuwato.Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Pelayanan.menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Akuntabilitas.menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup. Dan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Kinerja Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional sudah baik, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihanpelatihan manajemen dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel namun memiliki wibawa, batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus. Kinerja Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa diperoleh kesimpulan bahwa Strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah

dilakukan oleh BUMDES di Desa Pohuwato ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Kinerja Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Pohuwato telah menambah penghasilan bagi pengurus, komisaris dan juga masyarakat yang terlibat, serta telah mampu mengurangi jumlah pengangguran anak muda yang ada di desa terutama masyarakat nelayan yang tinggal di pinggiran pantai. Selain itu juga dengan adanya depot nelayan dan kios nelayan di Desa Pohuwato secara tidak langsung dapat menghemat biaya transportasi nelayan. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai dengan pelaporan keuangan, pelayanan, dan pembagian SHU telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga hasil riset terdahulu maka peneliti mengangkat judul penelitian dengan tema “**Analisis Pendapatan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga hasil riset terdahulu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan BUMDes ditinjau dari segi pengakuan pendapatan pada Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes ditinjau dari segi perencanaan dan pengawasan pada Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dalam penelitian ini yang dilakukan pada Bumdes yaituuntuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama data sekunder,

yaitu data yang diperoleh melalui penelitian berupa laporan hasil pengelolaan bumdes dan juga melalui wawancara langsung dengan informan terkait pendapatan dan pengelolaan Bumdes.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan BUMDes ditinjau dari segi pengakuan pendapatan pada Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes ditinjau dari segi perencanaan dan pengawasan pada Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi praktisi.

yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan BUMDes Secara Khusus dan Mampu menambah PAD Desa.

2. Manfaat bagi akademisi.

Sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan baik dosen maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pendapatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Manfaat bagi peneliti.

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan sebagai acuan penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

A. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang ⁹ jek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya darisubjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi

individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaiannya, (Tantan Hermansyah dkk, 2009:31). Setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagaimana berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Widjaja, (2003:169) “pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya”.

Menurut Abu Huraerah, (2008:87) “mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki”.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Konsep Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi *profit* maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi, dkk (2012:186) adalah “Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Greuning, *et al.* (2013:289-290) mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut: “IAS 8 mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk *bruto* dari manfaat ekonomis selama periode, muncul dari aktivitas bisnis normal, dan menghasilkan kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari kontribusi pemilik ekuitas”.

Menurut Sodikin dan Riyono (2014:37), “Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat

ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Kemudian Lam dan Lau (2014:317) mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut:

“Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk *bruto* dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1) mendefinisikan:

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Selanjutnya pada halaman 23.2 paragraf 7 dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk *bruto* dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Martani, dkk (2016:204) definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut: “Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan adalah penghasilan yang

berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti(*royalty*)”.

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi.Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya (andal).Dalam kenyataan praktek akuntansi, pengakuan pendapatan suatu perusahaan untuk periode tertentu dapat terjadi pada saat sebelum atau sesudah penjualan.Dilihat dari hal ini, maka secara teoritis titik waktu pengakuan pendapatan dapat diakui pada saat tertentu (Erlina Diansyah, 2009:29), yakni:

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan) Penjualan dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan.
2. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan
 - a. Pengakuan pendapatan selama proses produksi Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode persentase penyelesaian.Metode ini digunakan dalam kontrak proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu beberapa periode akuntansi. Syarat diterapkan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian adalah jika harga kontrak sudah pasti dan taksiran cost untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Pengakuan pendapatan setelah proses produksi Pengakuan pendapatan setelah proses

produksi mengakui pendapatan pada saat produksi selesai. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode kontrak selesai. Metode ini juga digunakan dalam proyek jangka panjang dimana pelaporan pendapatannya didasarkan pada hasil akhir proyek yang sudah diselesaikan.

3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan / saat kas diterima Pengakuan pendapatan pada saat diterima uang tunai atau kas terjadi, jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang atau perolehan kas yang timbul dari penjualan barang dan jasa, sehingga pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Kondisi ini biasanya ditemui pada pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan cicilan/angsuran.
4. Pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan khusus Pengakuan pendapatan yang dilakukan memerlukan ketentuan khusus karena penjualan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Jenis penjualan yang termasuk di dalam karakteristik ini adalah penjualan atas barang konsinyasi dan penjualan waralaba (franchise).

Selanjutnya Greuning, et al. (2013:290) menjelaskan bahwa pendapatan tidak dapat diakui ketika beban yang terkait tidak dapat diukur dengan andal. Pembayaran yang sudah diterima untuk penjualan tersebut harus ditangguhkan sebagai liabilitas sampai pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Pengakuan pendapatan atas jasa dilakukan sebagai berikut:

1. Ketika hasil (jumlah pendapatan, tahap penyelesaian, dan biaya) dari transaksi dapat diestimasikan dengan andal, pendapatan diakui menurut tingkat penyelesaian pada tanggal pelaporan.
2. Ketika hasil dari transaksi tidak dapat diestimasikan dengan andal, biaya kontrak yang dapat

diperbaharui akan menentukan besarnya pengakuan pendapatan.

Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan.

Greuning, et al. (2013:291) mengemukakan bahwa pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari pembayaran yang diterima atau akan diterima sebagai piutang. Sementara itu Lam dan Lau (2014:317-318) mengemukakan pendapatnya mengenai pengukuran pendapatan sebagai berikut: Pendapatan diukur pada nilai wajarnya dari pembayaran diterima atau dapat diterima ke dalam pencatatan jumlah dari banyak potongan dan potongan harga yang ditentukan entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi dengan merujuk pada perjanjian antara entitas dan pembeli atau pengguna dari aset. Nilai wajar (fair value) adalah jumlah dimana sebuah aset bisa ditukarkan atau sebuah liabilitas lunas, antara yang diketahui sepenuhnya, yang secara sukarela dalam transaksi wajar.

Selanjutnya Lam dan Lau (2014:327) menjelaskan bahwa “Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tahap penyelesaian suatu transaksi sering kali disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Berdasarkan metode ini, entitas mengakui pendapatan dalam periode akuntansi yang mana jasa diserahkan, yang menyediakan informasi bermanfaat pada besarnya kegiatan jasa dan kinerja selama satu periode”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.2) menyatakan: Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembelian atau penggunaan aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas.

Pendapat Martani, dkk (2016:204) mengenai pengukuran pendapatan adalah: Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk pengalihan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengukuran pendapatan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar pembayaran yang diterima atau akan diterima. Dimana nilai wajar adalah nilai yang diterima dari suatu penjualan aset atau yang dibayarkan atas pengalihan liabilitas yang telah disetujui kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

C. Konsep Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa :“Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menanganis esuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto). Nanang Fattah,(2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi Pengelolaan Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya.

Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan (manajemen), meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

a. Perencanaan (Planning)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi,

dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

- 1). Apa yang dilakukan?
- 2). Siapa yang melakukan?
- 3). Di mana akan melakukan?
- 4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- 5). Bagaimana melakukannya?
- 6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan

mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota- anggota organisasi.

c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan

sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan

mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen. Pada Penelitian ini peneliti cenderung menggunakan perencanaan dan pengawasan untuk melihat sejauh mana pengelolaan atau manajemen yang ada di BUMDes.

D. Konsep Bumdes

BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) : “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba). BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup

kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Maksud Pendirian BUMDes

Sebagai usaha desa guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Menjadikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa
5. Mendorong berkembangnya Usaha Mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pelapas uang/rentenir
6. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa dan member pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Meningkatkan kesempatan usaha dalam mengurangi pengangguran serta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
8. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Landasan Hukum

1. Pasal 213 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
2. Pasal 78,79,80 dan 81 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Surat mentri dalam Negri tanggal 17 Februari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan Mikro/usaha ekonomi Masyarakat

Sasaran Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran:

1. Terlayaninya masyarakat didesa dalam mengembangkan usaha produktif.
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Usaha Mikro didesa yang mencangkup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian Usaha Mikro didesa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi.

Strategi

1. Menciptakan system penjaminan (guarantee financial system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif Usaha Mikro.
2. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha.
3. Menata dan memperkuat tenaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi Usaha Mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

2.2. Kerangka Pemikiran

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut,(UU No 6 Tahun 2014). Desa juga berperan sebagai aktor peningkatan perekonomian masyarakat, maka dari itu pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran melalui dana desa.

Setiap desa berhak mendapatkan anggaran 1miliar dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah pusat telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2014 sebagai landasan dalam sistem pengelolaannya. Melalui peraturan mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah demi mewujudkan peningkatan masyarakat maka dengan ini di setiap desa harus mendirikan badan

usaha milik desa (BUMDes).Badan usaha milik desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No.32 tahun 2004. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagai yang berbunyi: Badan usaha milik desa,yang selanjutnya disebut BUMDes,adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pada penelitian ini fokus pada pengakuan pendapatan yang megacu pada pendapat Erlina Diansyah (2009:29), yakni:

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan), penjualan dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan.Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan diantaranya :
 - a. Pengakuan pendapatan selama proses produksi Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode persentase penyelesaian.Metode ini digunakan dalam kontrak proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu beberapa periode akuntansi. Syarat diterapkan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian adalah jika harga kontrak sudah pasti dan taksiran cost untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Pengakuan pendapatan setelah proses produksi Pengakuan pendapatan setelah proses produksi mengakui pendapatan pada saat produksi selesai. Metode akuntansi yang digunakan adalah

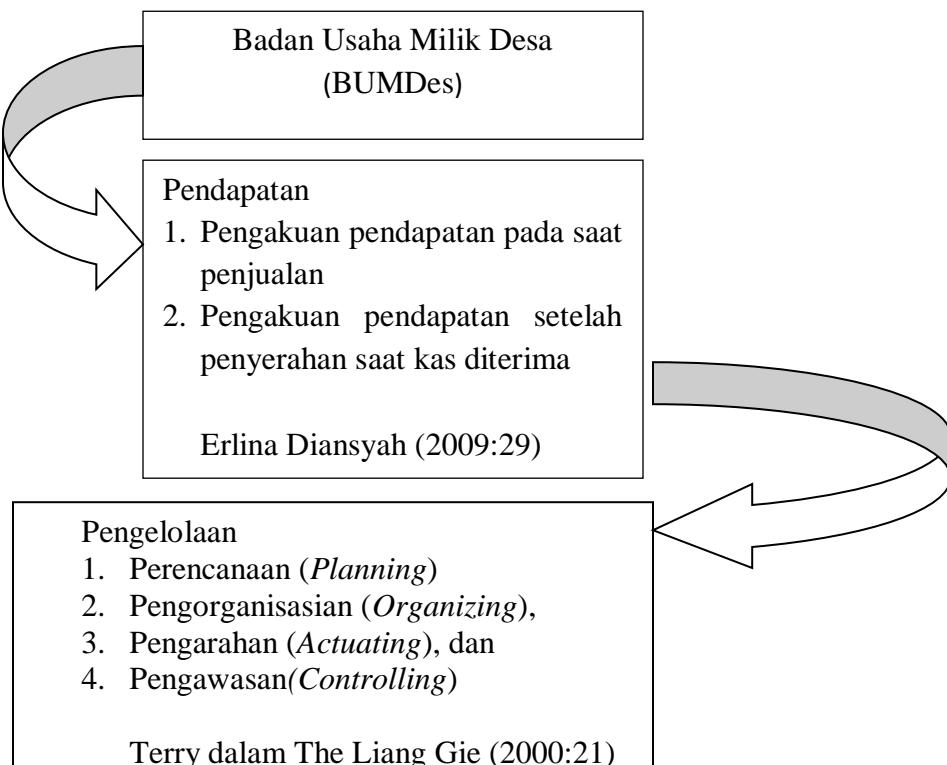
metode kontrak selesai. Metode ini juga digunakan dalam proyek jangka panjang dimana pelaporan pendapatannya didasarkan pada hasil akhir proyek yang sudah diselesaikan.

2. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan / saat kas diterima

Pengakuan pendapatan pada saat diterima uang tunai atau kas terjadi, jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang atau perolehan kas yang timbul dari penjualan barang dan jasa, sehingga pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Kondisi ini biasanya ditemui pada pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan cicilan/angsuran.

Sedangkan untuk pengelolaan peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan (manajemen), meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Berdasarkan uraian kerangka pikir yang ada, dibawah ini secara ringkas digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian yang dilakukan penulis adalah Pendapatan ditinjau dari segi pengeluaran dan penerimaan, serta pengelolaan di tinjau dari aspek sumber dan aspek pendapatan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Desain penelitian

Menurut Husain Umar (2002 : 36), bahwa desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan konprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

penelitian. Dalam perencanaan tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah pemberian arti atau mendefinisikan istilah-istilah pokok yang ada dalam penelitian, dan merupakan penjelasan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data dan indikator-indikator yang diinginkan.

Agar memudahkan dan menghindari multitafsir atas makna dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan defenisi operasional variabel sebagai berikut :

A. Pengakuan Pendapatan yang menurut pendapat Erlina Diansyah (2009:29), yakni:

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan), penjualan dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan diantaranya :
 - a. Pengakuan pendapatan selama proses produksi Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode persentase penyelesaian. Metode ini digunakan dalam kontrak proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu beberapa periode akuntansi. Syarat diterapkan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian adalah jika harga kontrak sudah pasti dan taksiran cost untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Pengakuan pendapatan setelah proses produksi Pengakuan pendapatan setelah proses produksi

mengakui pendapatan pada saat produksi selesai. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode kontrak selesai. Metode ini juga digunakan dalam proyek jangka panjang dimana pelaporan pendapatannya didasarkan pada hasil akhir proyek yang sudah diselesaikan.

2. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan / saat kas diterima

Pengakuan pendapatan pada saat diterima uang tunai atau kas terjadi, jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang atau perolehan kas yang timbul dari penjualan barang dan jasa, sehingga pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Kondisi ini biasanya ditemui pada pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan cicilan/angsuran.

B. Pengelolaan berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan (manajemen), meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

Adapun aspek perencanaan meliputi:

- 1). Apa yang dilakukan?
- 2). Siapa yang melakukan?

- 3). Di mana akan melakukan?
- 4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- 5). Bagaimana melakukannya?
- 6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.

c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan literatur-literatur baik itu buku-buku, majalah-majalah, maupun buletin-buletin yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data kualitatif, yaitu data-data yang berupa pernyataan-pernyataan atau uraian-uraian dari sumber data yang ada.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
 - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Interview atau wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
- a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Marisa Utara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pohuwato.
2. Kepala Desa Pohuwato.
3. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
5. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Pohuwato.
6. Masyarakat Yang terlibat.

3.4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BUMDes Pohuwato

Desa Pohuwato merupakan salah satu Desa yang berada di ibukota Kabupaten Pohuwato yang terletak pada bagian selatan teluk Tomini yang berada diwilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Sejak awal terbentuknya desa Pohuwato pada tahun 1986 telah dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku. Diantaranya adalah suku bugis, tionghoa, jawa dan gorontalo, namun secara mayoritas Desa ini dihuni oleh masyarakat gorontalo. Nama desa Pohuwato sendiri berasal dari kata pilohuwata dan tolohuwata, pilohuwata pada tahun 1801 dikampung marisa dihuni oleh dua suku yaitu suku palapo dan suku gorontalo, pada waktu itu antara suku palapo dan suku gorontalo terjadi

perselisihan paham dan mengakibatkan perang antara kedua suku, pada akhirnya suku palapo kalah dalam perang lalu melarikan diri untuk bersembunyi melalui Topi lo Pohuwato (Sungai lo Pohuwato) sehingga hal tersebut menjadi inspirasi bagi para pengagas pembentukan Desa agar Desa ini dapat dinamakan Desa Pohuwato.

Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten Gorontalo.Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua kabupaten dan Desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2003 kabupaten Boalemo dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pohuwato, sejak mulai tahun 2007, Desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah administrasi yakni Desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan Desa Pohuwato yang terletak di bagian ~~barat yang~~ hanya di batasi dengan jalan sebagai perbatasan
39
antara dua Desa tersebut. Desa Pohuwato sendiri terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kramat, Dusun Andalas, dan Dusun Bina Kaya.

Panua Mandiri itulah nama dari Badan Usaha Milik Desa yang berada di kawasan Pesisir Pantai di Ibukota Kabupaten Pohuwato ini, Badan Usaha ini digagas dan dibentuk oleh Pemerintah Desa Pohuwato melalui musyawarah Desa bersama masyarakat pada akhir Tahun 2016. Dengan demikian, Bumdes ini baru berumur kurang lebih 4 Tahun, namun meski usia bumdes ini kurang lebih 4 tahun, tetapi pengurus beserta kepala unit usahanya mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha yang dimandatkan melalui mekanisme penyertaan modal oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Pusat.Karena ditahun 2020 mampu menambah satu jenis usaha lagi berupa kedai. Beberapa jenis usaha yang di kelola Bumdes Panua Mandiri, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Nampak pada gambar diatas bahwa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Panua Mandiri adalah, unit usaha kios nelayan, unit usaha Micro Bus, unit Usaha Tenda dan juga Depot Nelayan. Di tahun 2020 BUMDes ini telah berhasil menambah satu jenis usaha barunya yaitu kedai.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Analisis pendapatan di tinjau dari aspek pendapatan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Bumdes Bapak Dadang Dunggio beliau menyatakan bahwa :

“Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan), penjualan dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan ungkap beliau bahwa pengakuan pendapatan selama ini dicatat ketika barang dagangan telah berada ditangan pembeli, ada juga sewa yang di terima setelah

pelanggan menerima barang yang di sewakan seperti tenda, sama halnya dengan micro bus. Lebih lanjut lagi pengakuan pendapatan pada saat diterima uang tunai atau kas terjadi, jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan perolehan kas yang timbul dari penjualan barang dan jasa, sehingga pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Ketidakpastian pengumpulan perolehan kas tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Selain itu juga ungkap ketua bumdes bahwa masing-masing kepala unit usaha melaporkan hasil usaha kepada pengurus bumdes dan keuntungan dari hasil usaha di berikan kepada kepala unit sebesar 10 % ini berdasarkan hasil keputusan bersama”.

4.2.3. Analisis Pengelolaan meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

1). Apa yang dilakukan?

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes menyatakan bahwa pertama-tama yang dilakukan bumdes mengundang aparat desa dan juga masyarakat setempat untuk mengadakan

musyawarah desa yang dilakukan untuk menentukan jenis usaha apa yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa tersebut kemudian dibuatkan *Bisnis Plan*. Lebih lanjut lagi ungkap beliau bahwa usaha yang pertama didirikan dengan penyertaan modal Sembilan puluh juta dengan jenis usaha jasa sewa tenda, ungkapnya uang sebesar Sembilan puluh juta itu digunakan untuk belanja modal berupa pengadaan tenda, viar baja dan juga kursi, sampai dengan tahun 2021 ini bumdes telah berhasil mengembangkan usahanya dan sekarang sudah ada empat jenis usaha lainnya yang dikembangkan di antaranya, jasa taxi air, mikro bus, kios nelayan dan juga kedai”.

2). Siapa yang melakukan?

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwa seluruh anggota bumdes turut berpartisipasi dalam perencanaan usaha tersebut mulai dari ketua sampai dengan anggota, selain itu juga bumdes membentuk tim pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya usaha bumdes yang terdiri dari tiga orang yaitu ketua dan dua orang anggota, tidak hanya itu masing-masing unit usaha ada kepala unityang mengelola usaha tersebut”.

3). Di mana akan melakukan?

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwa kegiatan tersebut dilakukan di lokasi bumdes tetapi kadang kala dilakukan juga dirumah pengurus bumdes”.

4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwa untuk mencapai tujuan yang ditargetkan dibutuhkan *Bisnis Plan* yang matang agar usaha dapat berjalan serta dibutuhkan kerjasama yang baik antar pengurus bumdes dalam hal pengelolaan usaha tersebut”.

5). Bagaimana melakukannya?

“ Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwa pengurus bumdes , badan pengawas serta kepala unit usaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan apa yang telah di rencanakan, setiap akhir tahun juga diadakan musyawarah desa dimana pengurus bumdes menyampaikan usulan yang bersumber dari kepala unit usaha terkait kebutuhan untuk pengembangan unit usaha”.

6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwa untuk mencapai tujuan secara optimal mereka melakukan peningkatan pelayanan terhadap jasa yang di berikan dan memperbanyak stock barang dagang agar kebutuhankonsumen dapat terpenuhi, selain itu melakukan promosi baik itu melalui perorangan dan juga memanfaatkan sosial media.Selain itu juga kepala unit usaha melakukan pengelolaan usaha dengan selalu berkoordinasi dengan pengurus bumdes.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus bumdes bahwa pengurus bumdes selalu melakukan kerjasama dalam hal mengelolah bisnis yang dijalankan dan dalam pengelolaan bisnis tersebut masing-masing pengurus bumdes mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.Ungkap Ketua bumdes bapak dadang

dunggio bahwa bumdes tidak hanya di kelola oleh pengurus bumdes tetapi di setiap jenis usaha ada kepala unit usaha yang bertanggungjawab mengelola usaha yang didirikan serta membentuk badan pengawas agar supaya usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada”.

c. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bumdes bahwamelalui rapat bulanan yang diadakan secara berkala para pegurus, pengawas dan juga kepala unit usaha melakukan evaluasi terkait kegiatan usaha yang sedang berjalan baik dari sisi pengelolaan keuangan sampai dengan pengembangan usaha, Selain itu diadakan musyawarah tingkat desa yang diadakan tiap tahun dimana kepala unit usaha menyampaikan kebutuhan yang akan digunakan untuk pengembangan jenis usaha”.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus bumdes ,kegiatan bumdes di lakukan dengan mentaati segala macam aturan yang mengikat seperti perda dan juga AD ART.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan yang di kelola oleh kepala unit usaha di bumdes panua mandiri sudah sangat baik, karena penerimaan maupun pengeluaran dicatat dan di laporan dengan baik kepada para pengurus Bumdes, selain dari itu dari pendapatan yang dihasilkan mampu menanmbah satu jenis usaha yaitu kedai
2. Dari sisi pengelolaan menunjukkan bahwa perencanaan , pengorganisasian, pengarahan maupun pengawasan sudah baik, karena antar pengurus maupun pengelola unit usaha mampu melakukan kerjasama dengan baik, serta di bumdes panua juga telah dibentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi kinerja kepala unit usaha.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pengurus bumdes agar lebih maksimal lagi dalam mengembangkan usahanya supaya jenis usaha yang dikembangkan bisa bertambah di tahun berikutnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan surveikueisioner, agar waktu yang digunakan bisa lebih maksimal dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Adisasmita, rahardjo.2011.*Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Aziz, Moh. Ali dkk.2005.*Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Byars,L I dan Leslie W. Rue.2006. *Human Resource Management*.8th Edition. McGraw- Hill
- Erlinadiansyah, Tri Yuni.2009. *Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dengan Pendekatan Persentase Penyelesaian dalam Rangka Menyajikan Laporan Keuangan pada PT Pembangunan Perumahan (Persero)*. Surabaya: FE UNAIR.
- Fattah, Nanang.2006. *Landasan Mnajaemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty.
- Greuning, Hennie Van. et al. 2013. *International financial reporting standards : sebuah panduan praktis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS.Jakarta : Salemba
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/49672> (diakses pada tanggal 16 mei 2020)
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan ETAP*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lau, Peter dan Nelson, Lam. 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting) : Perspektif Ifrs Buku 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- MahendraAdi Nugraha. 2015. *Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi Studi di Kabupaten Tulungagung* 49
- Martani, Dwi dkk. 2016. *Akuntansi Tengah Berbasis PSAK (ed. 2, buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maryunani.2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, Jakarta,UIN Jakarta Press, 2013.

Nugroho J. S.2003. *Perilaku Konsumen, Edisi Pertama*, Prenada Media, Jakarta

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Purnama Sari. 2019. *Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Didesa Pohuwato Kabupaten Pohuwato*. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal) Vol.3, No.2, October 2019, Pp. 426– 4 ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 26228270 (Print) Journal Homepage: <Http://Jurnal.Stiem tanjung redeb.Ac.Id/Index.Php/Accountia>

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sodikin dan Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama,

Suhendra, K.2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Sutarno NS.2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia.

Umar, Husein, 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@umsan.ac.id

No.:19146/PIP/LEMLIT-UNISAN/I/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

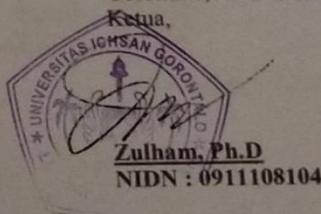
Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Fitriyanti B. Biki
NIM : E1119152
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : Bumdes Desa Pohuwato
Judul penelitian : Analisis Pendapatan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Januari 2021

Ketua,





BADAN USAHA MILIK DESA
BUMDesa PANUA MANDIRI
DESA POHUWATO KEC. MARISA KAB. POHUWATO
Jl. Pantai Marisa Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato-Gorontalo-96266

Marisa, 26 Januari 2021

Nomor : 001/BUMDesa-PM/I/2021
Lamp : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian
Dalam Rangka Penyusunan Proposal/Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Zulham, Ph.D
Ketua Lembaga Penelitian UNISAN Gorontalo

Di- Tempat

Menanggapi Surat Saudara No. : 1999/PIP/LEMLIT-UNISAN/I/2021 tanggal 12 Januari 2021. Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Dalam Rangka Penyusunan Proposal/Skripsi, pada Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Fitriyanti B. Biki
NIM : E1119152
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntasi

Dengan ini kami telah setujui untuk Pengambilan Data pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesa PANUA MANDIRI sebagai syarat Dalam Rangka Penyusunan Proposal/Skripsi.

Demikian Surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Ketua
BUMDesa PANUA MANDIRI



Dadang Dunggi, S.Kom



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0015/UNISAN-G/S-BP/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FITRIYANTI B. IKI
NIM : E1119152
Program Studi : AKUNTANSI (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Di Desa Pohuwato Kabupaten
Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

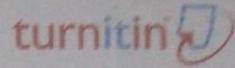
Gorontalo, 22 Februari 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI TURNTIN FITRIANTI B IKI (2).docx

Feb 18, 2021

8783 words / 59404 characters

E1119152

FITRIANTI B IKI (2).docx

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | download.garuda.ristekdikti.go.id INTERNET | 6% |
| 2 | eprints.polsri.ac.id INTERNET | 3% |
| 3 | www.scribd.com INTERNET | 2% |
| 4 | media.neliti.com INTERNET | 2% |
| 5 | brainly.co.id INTERNET | 2% |
| 6 | Universidad Francisco de Paula Santander on 2020-03-29 SUBMITTED WORKS | 2% |
| 7 | Universitas Andalas on 2021-01-20 SUBMITTED WORKS | 1% |
| 8 | digilib.unila.ac.id INTERNET | 1% |
| 9 | Erly Rayen Runtu, Caroline Betsi Diana Pakasi, Lyndon Reindhardt Jacob Pangemanan. "KAJIAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM ... CROSSREF | <1% |
| 10 | Andy Prasetyawan Hamzah, Akhmad Priharjanto, Dyah Purwanti. "PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDA... CROSSREF | <1% |
| 11 | digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET | <1% |
| 12 | core.ac.uk INTERNET | <1% |
| 13 | es.scribd.com INTERNET | <1% |
| 14 | State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-04-25 SUBMITTED WORKS | <1% |
| 15 | id.123dok.com INTERNET | <1% |
| 16 | repository.uin-suska.ac.id INTERNET | <1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 18 | Universitas Negeri Makassar on 2013-08-15 SUBMITTED WORKS | <1% |
| 19 | www.journal.stieamkop.ac.id INTERNET | <1% |
| 20 | repository.uinjkt.ac.id INTERNET | <1% |
| 21 | Sunnyslope High School on 2020-06-29 SUBMITTED WORKS | <1% |
| 22 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2021-01-28 SUBMITTED WORKS | <1% |
| 23 | www.researchgate.net INTERNET | <1% |
| 24 | ejournal.ipdn.ac.id INTERNET | <1% |
| | repository.ubharajaya.ac.id INTERNET | <1% |

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Fitriyanti B. Iki |
| NIM | : | E11.19.152 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Marisa, 27 April 2000 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Angkatan | : | 2019 |
| Fakultas | : | Ekonomi |
| Jurusan | : | Akuntansi |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato |

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN Teratai pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan Ke jenjang selanjutnya Yakni di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Marisa dan Lulus Pada tahun 2014
3. Kemudian Melanjutkan Ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 dan Lulus pada Tahun 2017
4. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konversi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Allhamdulillah pada tahun 2021 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo